

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47/B/HK/2019 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

Pasal 1

- (1) Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Daftar Program Studi yang Diakreditasi oleh:
 1. LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
 3. LAM Kependidikan;
 4. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal;

5. LAM Informatika dan Komputer;
 6. LAM Program Studi Keteknikan.
- (3) Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi modus penyelenggaraan tatap muka, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), atau modus penyelenggaraan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Program Studi yang tidak termasuk dalam Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakreditasi oleh BAN-PT sampai dengan berdirinya LAM yang sesuai dengan program studi tersebut.
 - (5) Perguruan Tinggi dapat memilih LAM yang akan melakukan akreditasi bagi program studi yang termasuk pada lebih dari 1 (satu) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) program studi tersebut dengan LAM yang akan melakukan akreditasi, dengan mengikuti prosedur yang diatur oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.
 - (6) Perguruan Tinggi dengan program studi yang mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu program studi yang termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai nama program studi yang berbeda, dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM terkait dengan mengikuti prosedur yang diatur oleh DE BAN-PT.
 - (7) Perguruan Tinggi dengan program studi yang termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang tidak sesuai dengan LAM di dalam Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM tersebut, dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM lain yang sesuai atau oleh BAN-PT bila LAM yang sesuai belum ada, dengan mengikuti prosedur yang diatur oleh DE BAN-PT.
 - (8) Perguruan Tinggi dengan program studi yang belum termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu LAM, dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM tersebut dengan mengikuti prosedur yang diatur oleh DE BAN-PT.
 - (9) Perguruan Tinggi dengan program studi yang bersifat multi, inter, atau trans disiplin dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM yang paling dekat dengan kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan program studi tersebut dengan mengikuti prosedur yang diatur oleh DE BAN-PT.
 - (10) DE BAN-PT dapat memasukkan program studi dengan nama berbeda namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu program studi di dalam

Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke LAM terkait.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi, organisasi profesi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dapat mengajukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.